

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan global saat ini, seperti sudah disepakati banyak pihak, tidak terlepas dari kekurangan sistem keuangan global yang berlaku saat ini di mana perilaku yang tidak terkendali akhirnya merusak sistem keuangan itu sendiri dan ujungnya menyeret perekonomian dunia ke dalam krisis terhebat sejak "*The Great Depression*" pada 1929. Kejayaan semu yang sempat dinikmati sistem keuangan global tersebut membuat banyak pelaku yang spekulatif, tamak, dan ambisius melupakan prinsip utama bahwa dalam suatu sistem perekonomian ada batas maksimum risiko yang tidak boleh dilampaui. Keberhasilan seorang pelaku dalam transaksi ekonomi dan keuangan pun ada batasnya (economy.okezone.com, 17 Agustus 2009).

Perekonomian Indonesia masih mencatat peningkatan pada triwulan pertama tahun ini. Pada tiga bulan pertama ini, pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia sudah 5,7 persen, jauh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang hanya 4,2 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Yang menarik, kinerja ekspor sudah mulai naik, kendati perekonomian global limbung. Investasi pun terkerek. Hanya, belanja pemerintah, yang mestinya bisa menjadi motor perekonomian, justru letoi (majalah.tempinteraktif.com, 31 Mei 2010).

Kelemahan mendasar perekonomian di Indonesia terutama diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu kinerja keuangan yang buruk, daya saing yang rendah, ketiadaan

profesionalisme, tidak responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, pengelolaan ekonomi dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh. Selain itu tidak hanya pada persaingan dalam negeri saja bahkan telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan *stakeholders approach* (informasi-training.com).

Hasil studi empiris yang dilakukan para peneliti menyimpulkan bahwa CG (*Corporate Governance*) memberi kontribusi positif bagi perusahaan. Beberapa studi tentang CG adalah sebagai berikut :

1. *Governance Metrics International* menyimpulkan bahwa perusahaan dengan CG yang kurang efektif berpotensi lebih besar menerbitkan ulang laporan keuangan (*financial restatements*), dan cenderung tidak memenuhi reformasi CG (*Governance Metrics International*, 2005);
2. Dibandingkan perusahaan dengan *bad corporate governance*, perusahaan dengan *good corporate governance* (GCG) di era 1990-an menghasilkan laba yang lebih

tinggi, memiliki risiko bisnis yang lebih rendah, dan menuai kembalian (*return*) saham yang lebih tinggi (Brown and Caylor, 2004);

3. *Institutional Shareholder Service* (2006) menunjukkan bukti empiris bahwa telah terjadi transformasi CG, yaitu dari penerapan CG sebatas pemenuhan kewajiban menjadi bagian dari tanggung jawab kepemilikan (*ownership responsibility*).

Good Corporate Governance menjadi salah satu agenda penting dalam dunia bisnis akhir-akhir ini, terutama bagi badan usaha yang berada di dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Milik Negara (BUMN) yaitu surat keputusan No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang lebih rinci bagi BUMN dalam menerapkan GCG pada perusahaan masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, serta kewajaran (kbn.co.id).

Akuntan memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal, yang memiliki fungsi sebagai *compliance auditor* dan *internal business consultant* bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (dspace.widyatama.ac.id).

Berikut ini adalah salah satu cerita sukses penerapan *Good Corporate Governance* dengan adanya peranan dari pemeriksaan internal. Royal Ahold adalah perusahaan yang

berevolusi dari sebuah toko makanan dan minuman tunggal menjadi peritel terbesar ketiga di dunia didirikan sejak 117 tahun silam, telah dibawa ke ambang kepailitan. Sejumlah eksekutif bisnis penting *U.S. Foodservice*, sebuah distributor makanan terbesar yang diakuisisi Ahold empat tahun lalu, menggelembungkan laba 2001 dan 2002 lebih dari \$ 1 miliar dengan meminta rabat dari pemasok lebih dulu.

Setelah Audit forensic independen oleh *Price Waterhouse coopers* mengungkapkan kurangnya kendali internal dan buruknya praktik keuangan serta akuntansi, perusahaan ini menjadi subjek penyelidikan SEC (Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat) dan Departemen Kehakiman AS serta penuntut umum Belanda dan bursa saham Euronext. Tak heran jika Moberg, mantan CEO Ikea Group asal Swedia menyebut tahun 2003 sebagai tahun kerugian. Ia mengaku menghabiskan sebagian waktunya untuk memilah-milah. Ia memperkuat jajaran manajemen dengan menarik Hannu Ryooponen, mantan kolega Ikea, sebagai CEO dan menempatkan pengacara Belanda Peter Wakkie sebagai *Chief Corporate Governance*, sebuah peran yang sama sekali baru.

Tahun 2004, perusahaan ini telah memangkas hampir separuh utangnya menjadi sedikit dibawah \$ 9 miliar dan akan mendivestasi asset senilai \$ 3 miliar pada tahun 2005. Setelah menyatakan kerugian \$ 1,4 miliar pada 2002, perusahaan ini mencatat kerugian lebih sedikit sebesar \$ 1,2 juta pada 2003.

Membangkitkan kembali neraca Ahold merupakan salah satu tugas monumental yang dihadapi Moberg. Tugas lainnya adalah membangun ulang reputasi Ahold. Setelah menghabiskan \$ 205 juta sejak Februari 2003 untuk masalah *legal* dan *accounting*,

perusahaan ini memperketak kendali keuangan dan akuntansi. Selain menciptakan system terpusat untuk melacak kontrak dan pembayaran penjual area munculnya kecurangan perusahaan ini telah membentuk gugus tugas internal guna menjamin seluruh anak perusahaannya mematuhi system ini.

Sekarang fokus perusahaan bukan hanya memperbaiki tata kelola melainkan juga mmberi contoh. “Ahold telah memberikan teladan bagi perusahaan Belanda lainnya yang serius menangani masalah tata kelola korporat.,” ujar Kristof Ho Tiu, seorang analis di perusahaan konsultan Deminor Rating asal Brussels. Ahold telah menciptakan sebuah program pengungkapan kecurangan, yang sedang di gulirkan di AS sebelum diperluas secara global pada musim panas 2004 (Juli-Agustus).

Ahold sebenarnya kurang dalam pemeriksaan internal sehingga perusahaan mengalami kerugian yang diakibatkan karena adanya kecurangan-kecurangan. Dengan diadakannya pemeriksaan internal, perusahaan semakin membaik sehingga dapat sedikit demi sedikit memperbaiki tata kelola perusahaan dan dapat menciptakan *Good Corporate Governance* (*Bussiness Week*, 26 Mei 2004).

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000) pelaksanaan pemeriksaan intern adalah pekerjaan penilaian yang bebas (*independent*) di dalam suatu organisasi untuk meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan. Pemeriksaan intern juga dapat diartikan sebagai serangkaian proses dan teknik yang dilakukan karyawan intern suatu organisasi untuk meyakinkan manajemen, secara tangan pertama, observasi di tempat, apakah :

- pengendalian manajemen yang ada telah cukup memuaskan dan dibina secara efektif.
- catatan dan laporan keuangan, akuntansi dan lainnya menggambarkan dengan tepat dan segera kegiatan dan hasil yang sebenarnya.
- setiap bagian, seksi atau unit lainnya bekerja sesuai dengan rencana, kebijakan dan prosedur, yang dipertanggungjawabkan kepadanya. (Amin Widjaja:2000)

Berdasarkan informasi di atas pelaksanaan pemeriksaan intern sangat berperan bagi manajemen yang telah menerapkan struktur pengendalian intern yang merupakan bagian dari perusahaan terutama BUMN. Tetapi penulis belum mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemeriksaan intern dapat mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan tersebut.

Penelitian mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia telah dilakukan terlebih dulu oleh :

1. Eka Lusiana (2004) dengan judul “Hubungan Pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* (Studi Persepsi atas 18 Kepala Bidang PLN Divre Jawa Barat) yang menyimpulkan bahwa dia antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance* memiliki hubungan yang positif.
2. Yadi Hilyadi (2006) dengan judul “Hubungan Pelaksanaan Standar Profesi Internal Audit dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* pada PT PLN menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup berarti antara

pelaksanaan standar profesi internal auditor dengan terwujudnya Good Corporate Governance.

3. Fiky Firmansyah (2009) dengan judul “Hubungan antara Pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan Penerapan *Good Corporate Governance*” penelitian pada Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Jawa Barat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan penerapan Good Corporate Governance.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Fiky Firmansyah pada tahun 2009 dengan judul “Hubungan antara Pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (Penelitian pada Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Jawa Barat). Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN lainnya seperti pada PT. PINDAD (Persero). Melihat bahwa *Good Corporate Governance* terjadi jika ada peranan dari pemeriksaan intern. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik “ Hubungan antara Pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan Penerapan *Good Corporate Governance* Penelitian pada PT.PINDAD (Persero)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian ini, masalah yang dapat diteliti dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan penerapan *Good Corporate Governance*?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

“Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan penerapan *Good Corporate Governance*.”

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini berguna untuk penulis, perusahaan, pihak lain.

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan peran komite audit terhadap kinerja perusahaan.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan informasi bagi pihak Dewan Komisaris, Direksi agar kinerja perusahaan mereka semakin meningkat.
3. Bagi pihak lain, untuk menambah wawasan terhadap penelitian akuntansi mengenai pelaksanaan intern dengan penerapan *Good Corporate Governance*.